

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR REVISI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Maksud Dan Tujuan	16
1.4 Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI.....	20
2.1 Tinjauan Pustaka	20
2.1.1 Kebijakan Publik	20
2.1.2 Kebijakan	22
2.1.3 Implementasi	26
2.1.4 Implementasi Kebijakan	29
2.1.5 Model Implementasi Kebijakan	31
2.1.6 <i>Elektronik Government (E-Government)</i>	51
2.2 Kerangka Pemikiran	55
2.3 Proposisi	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61

3.1 Metode Penelitian	61
3.2 Informan Penelitian	61
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.3.1 Studi Pustaka	64
3.3.2 Studi Lapangan	64
3.4 Uji Keabsahan Data	66
3.5 Teknik Analisa Data	67
3.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian	69
BAB IV HASIL PENELITAIAN DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Gambaran Umum Kota Bandung	71
4.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung.....	77
4.2.1 Visi Dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	78
4.2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.....	80
4.3 Gambaran Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu Kota Bandung	97
4.4 Implementasi Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU.....	103
4.4.1 <i>Communication</i> Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	105
4.4.1.1 <i>Transmission</i> Atau Penyampaian Informasi Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	109
4.4.1.2 <i>Clarity</i> Atau Kejelasan Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	114

4.4.1.3	<i>Consistency</i> Atau Konsistensi Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	118
4.4.2	<i>Resources</i> Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	123
4.4.2.1	<i>Staf</i> Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	124
4.4.2.2	Informasi Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	128
4.4.2.3	Wewenang Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	141
4.4.2.4	Fasilitas Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	145
4.4.3	<i>Disposition</i> Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	146
4.4.3.1	Efek Disposisi Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	148
4.4.3.2	Insentif Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	152
4.4.4	Bureaucratic Structure Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	153

4.4.4.1 Standard Operating Procedures (SOP) Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU	155
4.4.4.2 Fragmentasi Dalam Kebijakan <i>E-Government</i> di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU.....	160
BAB V PENUTUP	164
5.1 Kesimpulan	164
5.2 Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN-LAMPIRAN	173